

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kinerja pembangunan ekonomi di Jawa Tengah selama periode tahun 2016 menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan. Apabila pada tahun 2015 perekonomian Jawa Tengah mampu tumbuh sebesar 5,4%, maka pada triwulan III 2016 ini pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah telah mencapai 5,06% dimana proyeksi Bank Indonesia atas pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada triwulan IV diperkirakan akan meningkat akibat konsumsi masyarakat yang didorong oleh hari raya Natal dan Tahun Baru serta realisasi investasi baik dari swasta maupun pemerintah.

Selama Tahun 2016 upaya pemberdayaan Koperasi dan UMKM di Jawa Tengah difokuskan pada peningkatan produktivitas dan daya saing UMKM serta pengembangan produk unggulan daerah perdesaan melalui pendekatan OVOP berbasis Koperasi. Sesuai dengan target RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2013 – 2018, pada tahun 2016 jumlah produk OVOP ditargetkan sebanyak 175 komoditas di 35 Kabupaten/Kota dan telah tercapai. Berbagai upaya pemberdayaan Koperasi dan UMKM serta kondisi pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah yang positif ini juga mempengaruhi peningkatan aset dan omset Koperasi, dimana hingga Desember 2016 aset Koperasi sebesar Rp. 57,638 triliun (tumbuh 17,33% *yoj*), sedangkan untuk omzet Koperasi sebesar Rp. 54,112 triliun (tumbuh 13,45%, *yoj*). Dengan jumlah koperasi aktif di Jawa Tengah mencapai 23.276 unit atau 81,78% dari 28.460 unit Koperasi yang mampu melayani 8.058.547 anggota koperasi di Jawa Tengah (tumbuh 3,20%, *yoj*). Sektor Koperasi dan UMKM juga turut berkontribusi positif terhadap penyerapan tenaga kerja di Jawa Tengah. Dari sektor Koperasi, pada Desember 2016 jumlah tenaga kerja yang bekerja pada sektor Koperasi sebanyak 153.945 orang, dan sektor UMKM Binaan mencapai 791.767 orang.

Dengan telah diberlakukannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, memberikan kewenangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota untuk mengurus dan memajukan daerahnya sendiri guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, dan

pemberdayaan peran serta masyarakat. Setelah penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program – program pembangunan, perlu dilakukan evaluasi program/kegiatan guna mengetahui sejauh mana efektivitas atas program/kegiatan yang sudah dilakukan terhadap pencapaian sasaran sesuai dengan visi misi suatu instansi. Salah satu bentuk pertanggungjawaban yang wajib dilakukan oleh instansi pemerintah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Dokumen LKjIP sendiri disusun sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan tugas, pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi serta sebagai alat penilaian dan pengendalian dalam rangka memacu peningkatan kinerja organisasi.

B. LANDASAN HUKUM

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 dilandasi dengan dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
4. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pemberantasan Korupsi.
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Provinsi Jawa Tengah adalah :

1. Untuk mengetahui pencapaian kinerja sasaran SKPD sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Renstra SKPD;
2. Sebagai acuan untuk perencanaan kegiatan di tahun mendatang, khususnya dalam perencanaan kinerja di tahun mendatang;
3. Sebagai bukti akuntabilitas kepada Publik atas penggunaan sumber daya dalam rentang waktu satu tahun.

D. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 67 Tahun 2008 Tentang penjabaran Tugas Pokok , Fungsi dan Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah ; maka sesuai Pergub Nomor 67 bab II bagian pertama, pasal 2, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas pokok **“melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan”**.

Adapun Fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah adalah:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
3. Pembinaan dan fasilitasi bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah lingkup Provinsi dan Kabupaten / Kota;

4. Pelaksanaan tugas di bidang Kelembagaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta Pemberdayaan Koperasi Simpan Pinjam lingkup Provinsi dan Kabupaten / Kota;
5. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Lingkup Provinsi dan Kabupaten / Kota;
6. Pelaksanaan kesekretariatan dinas;
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut diatas menurut pasal 4 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 67 tahun 2008, Kepala Dinas dibantu/membawahkan:

1. Sekretariat;
2. Bidang Kelembagaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
3. Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
4. Bidang Peberdayaan Koperasi;
5. Bidang Pemberdayaan Koperasi Simpan Pinjam;
6. UPTD Balatkop dan UMKM;
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

E. SUSUNAN KEPEGAWAIAN DAN SARPRAS

1. Susunan kepegawaian :

Jumlah pegawai/personil Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 sebanyak 138 orang terdiri dari :

Pegawai Negeri Sipil	: 137 orang
Pekerja Harian Lepas	: 1 orang

Tabel 1.
Kekuatan Personil PNS Menurut Golongan

BIDANG	GOL I		GOL II		GOL III		GOL IV		JUMLAH
	P	W	P	W	P	W	P	W	
Sekretariat	2	0	5	0	11	16	2	2	38
Kelembagaan Koperasi & UMKM	1	0	3	1	9	2	2	2	20
Pemberdayaan UMKM	0	0	4	0	7	3	4	0	18
Pemberdayaan Koperasi	0	0	1	0	11	4	1	2	19
Pemberdayaan KSP	0	0	0	1	6	9	0	1	17
Balatkop	4	0	2	1	6	8	2	0	23
Diperbantukan KPU Jateng	0	0	0	0	1	0	0	1	2
JUMLAH	7	0	15	3	51	42	9	8	137

Tabel 2.
Kekuatan Personil PNS Menurut Pendidikan

BIDANG	SD		SMP		SMA		DIII		S1		S2		JUMLAH
	P	W	P	W	P	W	P	W	P	W	P	W	
Sekretariat	0	0	3	0	4	0	1	1	6	13	6	4	38
Kelembagaan Koperasi dan UMKM	0	0	0	1	7	0	0	0	5	3	3	1	20
Pemberdayaan UMKM	1	0	1	0	2	0	3	0	1	3	7	0	18
Pemberdayaan Koperasi	0	0	0	0	4	0	0	0	3	4	6	2	19
Pemberdayaan KSP	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	1	6	17
Balatkop	1	0	0	0	7	3	0	0	4	5	2	1	23
Diperbantukan KPU Jateng	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2
JUMLAH	2	0	4	1	24	3	4	1	24	33	26	15	137

Tabel 3.
Struktur Esselon PNS Menurut Jenis Kelamin

PENDIDIKAN	PRIA	WANITA	JUMLAH
Esselon II	-	1 orang	1 orang
Esselon III	3 orang	3 orang	6 orang
Esselon IV	7 orang	6 orang	13 orang
JUMLAH	9 orang	11 orang	20 orang

*Catatan : 3 PNS diperbantukan ke KPU Prov. Jateng dengan 2 orang menduduki jabatan Esselon III dan 1 orang menduduki jabatan Esselon IV, dimana untuk Gaji dan TPP tetap dianggarkan pada Dinas Koperasi dan UMKM Prov. Jateng

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah memperoleh alokasi 1 (satu) orang widyaiswara yang ditempatkan pada UPTD Balatop untuk mendukung pelayanan pada bidang pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat KUMKM.

2. Sarana dan Prasarana :

Sarana dan Prasarana yang dimiliki Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

Tabel 4.
Tanah dan Gedung Yang Dimiliki

NO	URAIAN	LUAS
1	Tanah 6 (enam) bidang terdiri dari	
	a. Tanah Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah	3.243 M ²
	b. Tanah UPTD Balatkop 1	5.500 M ²
	c. Tanah UMKM Center	2.617 M ²
	d. Tanah UPTD Balatkop 2	2.320 M ²
	e. Tanah PLUT KUMKM di Ds Dukuh Waluh Kec. Kembaran Kab. Banyumas	927 M ²
	f. Tanah di Ds. Dawuhan Kab. Banyumas	480 M ²
2	Bangunan Gedung 5 unit terdiri dari	
	a. Bangunan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah	1.486 M ²
	b. Bangunan Balatkop	3.367 M ²
	c. Bangunan UMKM Center	2.990 M ²
	d. Bangunan PLUT KUMKM di Ds. Dukuh Waluh Kec. Kembaran Kab. Banyumas	654 M ²
	e. Bangunan di Ds. Dawuhan Kab. Banyumas	120 M ²

Tabel 5.
Kendaraan Bermotor Yang Dimiliki

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) sejumlah 13 (tiga belas) unit terdiri dari :	
	a. Honda Civic VTI Tahun 2001 (H 54)	1 unit
	b. Toyota Innova Tahun 2014 (H 275)	1 unit
	c. Toyota Kijang LGX Tahun 2004 (H 9504 VR)	1 unit
	d. Toyota Innova G Diesel Tahun 2005 (H 9501 GR)	1 unit
	e. Toyota Avansa 1300 G Tahun 2010 (H 9501 HG)	1 unit
	f. Toyota Avansa 1300 G Tahun 2010 (H 9501 FR)	1 unit
	g. Toyota Innova Tahun 2011 (H 9506 CG)	1 unit
	h. Toyota Innova Tahun 2011 (H 9506 KG)	1 unit
	i. Toyota Innova Tahun 2011 (H 9506 PR)	1 unit
	j. Toyota Innova Tahun 2011 (H 9506 GZ)	1 unit
	k. Toyota Avanza Veloz Tahun 2013 (H 9529 ZR)	1 unit
	l. Suzuki APV 1500 GL Tahun 2014 (H 9525 FZ)	1 unit
	m. Pick Up Tahun 2015 (H 9579 VG)	1 unit
2	Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua) sejumlah 8 (delapan) unit terdiri dari	
	a. Di Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah	8 unit

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Tahun 2016 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah memfokuskan pencapaian sasaran utama pada:

1. Peningkatan kapasitas kelembagaan Koperasi dan UMKM;
2. Pengembangan Produk Unggulan Daerah berbasis Sumber Daya Lokal;
3. Peningkatan akses permodalan dan efektivitas pembiayaan bagi Koperasi dan UMKM;
4. Peningkatan produktivitas jaringan pemasaran dan usaha Koperasi dan UMKM;
5. Peningkatkan kualitas SDM Koperasi dan UMKM.

Sasaran-sasaran dimaksud perlu diprioritaskan dalam rangka untuk mendukung tercapainya visi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah yaitu **"SEJAHTERA BERSAMA KOPERASI DAN UMKM"**. Guna mencapai sasaran dimaksud maka pada tahun 2016 telah menetapkan 5 program utama dan 53 kegiatan .

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana stratejik adalah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, tantangan dan hambatan yang timbul. Rencana stretegis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah Provinsi Jawa Tengah tahun 2013 - 2018 merupakan bagian integral dari kebijakan dan program Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh aparat dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu sejak 2013 – 2018.

Untuk mewujudkan Renstra tentu perlu ditunjang dengan Visi dan Misi yang rasional. Untuk itu dapat diperhatikan Visi dan Misi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah yaitu :

1. Visi

Visi merupakan suatu keadaan atau harapan yang harus diwujudkan pada masa yang akan datang. Seperti diketahui bersama bahwa Visi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun 2013 – 2018 yaitu "**Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari – Mboten Korupsi Mboten Ngapusi**". Dengan mengacu pada Visi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tersebut, maka SKPD Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah memiliki Visi sebagai berikut "**SEJAHTERA BERSAMA KOPERASI DAN UMKM**". Makna yang terkandung dari visi diatas adalah :

SEJAHTERA

Sejahtera merupakan suatu kondisi dimana segala macam kebutuhan masyarakat terpenuhi, baik berupa kebutuhan jasmani maupun rohani. Dalam konteks pembangunan Koperasi dan UMKM, sejahtera berarti tercukupinya kebutuhan masyarakat Koperasi dan UMKM baik lahir maupun batin, dimana hal sesuai dengan amanat UU No. 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian. Mengingat bahwa kondisi sejahtera dinamis sesuai dengan tuntutan dan aspirasi yang berkembang, maka diperlukan upaya terus – menerus dalam penyempurnaan paket kebijakan, strategi program kegiatan serta pembinaan guna mewujudkan kondisi tersebut.

BERSAMA

Bersama merupakan suatu ikatan yang terbentuk atas dasar kesamaan tujuan maupun rasa kekeluargaan, dimana salah satu ciri utamanya adalah rasa saling memiliki dan kepedulian antar anggota terhadap kondisi dan arah hubungan yang terjalin. Dalam konteks pembangunan Koperasi dan UMKM, bersama berarti suatu hubungan yang harmonis antara Pemerintah, Gerakan Koperasi dan UMKM, serta masyarakat dan para pemangku kebijakan lainnya dalam mensinergikan upaya pembangunan Koperasi dan UMKM guna memperoleh hasil yang optimal.

Dengan demikian visi "SEJAHTERA BERSAMA KOPERASI DAN UMKM" dapat didefinisikan sebagai upaya perwujudan kesejahteraan masyarakat Koperasi dan UMKM melalui sinergisitas antara pemerintah, masyarakat serta segenap pemangku kepentingan lainnya.

2. Misi

Visi tersebut dilaksanakan melalui Misi sebagai berikut:

- a. Misi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah adalah sbb:
 - 1) Membangun Jawa Tengah berbasis Trisakti Bung Karno, Berdaulat di Bidang Politik, Berdikari di Bidang Ekonomi, dan Berkepribadian di Bidang Kebudayaan
 - 2) Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan, Menanggulangi Kemiskinan dan Pengangguran
 - 3) Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang Bersih, Jujur dan Transparan, “Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”
 - 4) Memperkuat Kelembagaan Sosial Masyarakat untuk Meningkatkan Persatuan dan Kesatuan
 - 5) Memperkuat Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan dan Proses Pembangunan yang Menyangkut Hajat Hidup Orang Banyak
 - 6) Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik untuk Memenuhi Kebutuhan Dasar Masyarakat
 - 7) Meningkatkan Infrastruktur untuk Mempercepat Pembangunan Jawa Tengah yang Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan
- b. Misi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah adalah:
 - 1) Mewujudkan Koperasi yang berkualitas dan sehat.
 - 2) Mengembangkan Produk Unggulan Daerah Jawa Tengah yang berdaya saing.
 - 3) Penumbuhan wirausaha baru dan perluasan kesempatan kerja.
 - 4) Mewujudkan Sumber Daya Manusia Pengelola Koperasi dan UMKM yang kompeten.
 - 5) Mewujudkan aparatur yang profesional, berdedikasi, tanggap dan berorientasi pada pelayanan prima dalam upaya pemberdayaan KUMKM.

3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran pada hakekatnya merupakan penjabaran dari misi untuk mewujudkan visi pembangunan Koperasi dan UMKM selama kurun waktu 2013-2018. Tujuan dan sasaran pada masing-masing misi diuraikan sebagai berikut :

1. Misi ke-1 yaitu **Mewujudkan Koperasi yang berkualitas dan sehat.**

Tujuan : Meningkatkan peran Koperasi dalam perekonomian Jawa Tengah.

Sasaran : Meningkatnya peran Koperasi dalam perekonomian Jawa Tengah.

2. Misi ke-2 yaitu **Mengembangkan Produk Unggulan Daerah Jawa Tengah yang berdaya saing.**

Tujuan :

a. Meningkatkan Jumlah Produk OVOP berbasis Koperasi di Jawa Tengah.

b. Meningkatkan daya saing KUMKM di Jawa Tengah

Sasaran :

a. Bertambahnya jumlah Produk OVOP berbasis Koperasi di Jawa Tengah

b. Meningkatnya daya saing KUMKM di Jawa Tengah.

3. Misi ke-3 yaitu **Penumbuhan wirausaha baru dan perluasan kesempatan kerja.**

Tujuan :

a. Meningkatkan jumlah wirausaha di Jawa Tengah

b. Meningkatkan penyerapan tenaga kerja oleh KUMKM

Sasaran :

a. Meningkatnya jumlah wirausaha baru di Jawa Tengah

b. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja oleh Koperasi dan UMKM.

4. Misi ke-4 yaitu **Mewujudkan Sumber Daya Manusia Pengelola Koperasi dan UMKM yang kompeten**

Tujuan : Meningkatkan kualitas SDM Pengelola Koperasi dan UMKM

Sasaran : Meningkatnya kualitas SDM Pengelola Koperasi dan UMKM.

5. Misi ke-5 yaitu **Mewujudkan aparatur yang profesional, berdedikasi, tanggap dan berorientasi pada pelayanan prima dalam upaya pemberdayaan KUMKM.**

Tujuan :

- a. Meningkatkan kualitas perencanaan pemberdayaan KUMKM
- b. Meningkatkan kualitas SDM Aparatur

Sasaran :

- a. Meningkatnya kualitas serta integrasi, sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pemberdayaan Koperasi dan UMKM antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- b. Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur

B. RENCANA KINERJA TAHUN (RKT) 2016

Dalam rencana kinerja Tahun 2016 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah, sasaran, indikator, dan target yang hendak dicapai adalah sebagai mana tercantum dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 5.
Rencana Kinerja Tahun (RKT) 2016

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya peran Koperasi dalam perekonomian Jawa Tengah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Presentase Koperasi Aktif 2. Presentase Koperasi Provinsi Berkualitas 3. Presentase Koperasi Sehat 4. Presentase Omset Koperasi terhadap PDRB Jawa Tengah 	<p>81,45%</p> <p>52%</p> <p>17,15%</p> <p>6,75%</p>
Bertambahnya jumlah produk OVOP berbasis Koperasi di Jawa Tengah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Produk OVOP berbasis Koperasi di Jawa Tengah 	175
Meningkatnya daya saing KUMKM di Jawa Tengah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Presentase Pertumbuhan Aset Koperasi 2. Presentase Pertumbuhan Aset UMKM yang dibina 3. Presentase Pertumbuhan Omset Koperasi 4. Presentase Pertumbuhan Omset UMKM yang dibina 	<p>13,25%</p> <p>12,25%</p> <p>13,30%</p> <p>11,70%</p>

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
	5. Presentase UMKM yang telah mengakses kredit 6. Jangkauan Pemasaran Produk KUMKM	25% 13 Prov, 2 Luar Negeri
Meningkatnya jumlah wirausaha baru di Jawa Tengah	1. Penumbuhan wirausaha baru di Jawa Tengah	300 orang
Meningkatnya penyerapan tenaga kerja oleh KUMKM	1. Presentase Pertumbuhan Tenaga Kerja KUMKM	12,25%
Meningkatnya kualitas SDM Pengelola Koperasi dan UMKM	1. Pengurus KUMKM yang terlatih	15.625

C. PENETAPAN KINERJA (PK) TAHUN 2016

Dari Rencana Kinerja Tahunan diatas, setelah dilakukan pembahasan dan penajaman dengan pihak terkait, maka telah dilakukan Penetapan Kinerja yang telah disepakati antara kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah dengan Kepala Daerah Tahun 2016, yaitu sebagai berikut :

Tabel 6.
Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2016

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Meningkatnya peran Koperasi dalam perekonomian Jawa Tengah	1) Presentase Koperasi Aktif	81,45%	Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan Koperasi dan UMKM	4.700.000.000
	2) Presentase Koperasi Provinsi Berkualitas	52%		
2. Bertambahnya jumlah Produk OVOP berbasis Koperasi di Jawa Tengah	3) Presentase Koperasi Sehat	17,15%	Program Peningkatan Produktivitas Pemasaran dan Jaringan Usaha	2.700.000.000
	4) Presentase omzet Koperasi terhadap PDRB Jawa Tengah	6,75%		
3. Meningkatnya daya saing KUMKM di Jawa Tengah	1) Jumlah Produk OVOP berbasis Koperasi di Jawa Tengah	175	Program Peningkatan Kualitas SDM KUMKM	2.889.414.000
	2) Presentase Pertumbuhan Aset Koperasi	13,25%		
4. Meningkatkan jumlah wirausaha di Jawa Tengah	3) Presentase Pertumbuhan Aset UMKM yang dibina	12,25%	Program Pengembangan Produk Unggulan Daerah berbasis Sumber Daya Lokal	12.291.377.000
	4) Presentase Pertumbuhan Omset Koperasi	13,30%		
	5) Presentase Pertumbuhan Omset UMKM yang dibina	11,70%		
	6) Presentase UMKM yang telah mengakses kredit	25%	Program Pengembangan Akses Permodalan dan Efektivitas Pembiayaan	1.389.683.000
	1) Jangkauan Pemasaran Produk KUMKM	13 Prov, 2 LN		
	2) Presentase UMKM yang telah mengakses kredit	25%		
5. Meningkatkan penyerapan tenaga kerja oleh KUMKM	1) Penumbuhan wirausaha baru di Jawa Tengah	300		
6. Meningkatnya kualitas SDM Pengelola Koperasi dan UMKM	1) Presentase Pertumbuhan Tenaga Kerja KUMKM	12,25%		
	1) Pengurus KUMKM yang kompeten	15.625		

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2016

Akuntabilitas kinerja dapat diartikan sebagai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian visi dan melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas .

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, yang telah ditetapkan dalam Visi dan Misi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah. Pengukuran dimaksud itu merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil.

Penilaian dimaksud tidak terlepas dari kegiatan mengolah dan masukan untuk diproses menjadi keluaran penting dan berpengaruh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran.

Pada pembahasan akuntabilitas kinerja Tahun 2016 ada 3 (tiga) aspek yang akan dibahas, yaitu :

1. Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS)
2. Evaluasi dan Analisis Kinerja
3. Akuntabilitas Keuangan

Untuk memudahkan interpretasi atas pencapaian kinerja sasaran dipergunakan interval nilai sebagai berikut :

- > 101 = Amat Baik
- 80 - 100 = Baik
- 50 - 79 = Cukup
- < 49 = Kurang

A. PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN

Hingga akhir tahun 2016, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun sasaran strategis yang hendak dicapai selama tahun 2016 adalah :

1. Meningkatnya peran Koperasi dalam perekonomian Jawa Tengah
2. Bertambahnya jumlah Produk OVOP berbasis Koperasi di Jateng
3. Meningkatnya daya saing KUMKM di Jawa Tengah
4. Meningkatkan jumlah wirausaha di Jawa Tengah
5. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja oleh KUMKM
6. Meningkatnya kualitas SDM Pengelola Koperasi dan UMKM

Untuk mengukur sejauh mana pencapaian atas sasaran tersebut sebagai tolak ukur keberhasilan pembangunan sektor Koperasi dan UMKM di Jawa Tengah, telah dilakukan pengukuran terhadap sasaran tersebut sebagai berikut :

a. Sasaran ke-1 :

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Sasaran ke-1, Indikator kinerja, target, dan realisasinya tercermin pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 7.
Pengukuran Pencapaian Sasaran ke-1**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Presentase (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya peran Koperasi dalam perekonomian Jawa Tengah	1. Presentase Koperasi Aktif	1. 81,45%	1. 81,78%	1. 100,41%
	2. Presentase Koperasi Provinsi Berkualitas	2. 52%	2. 52,13%	2. 100,25%
	3. Presentase Koperasi Sehat	3. 17,15%	3. 18,80%	3. 109,62%
	4. Presentase omzet Koperasi terhadap PDRB Jawa Tengah	4. 6,75%	4. Data belum tersedia	4. Data belum tersedia
Rata-Rata capaian sasaran ke-1				103,42%

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja **sasaran ke-1**, dari 4 indikator kinerja terdapat 3 indikator yang sudah dapat diukur kinerjanya, dan ada 1 indikator kinerja yang belum dapat diukur, yaitu Presentase Omset Koperasi terhadap PDRB Jawa Tengah. Penyebab indikator tersebut belum dapat diukur adalah belum tersedianya data PDRB Jawa Tengah Tahun 2016 oleh BPS. Adapun untuk ketiga indikator lainnya telah dapat diukur dan hasil rata – rata dari pengukuran ketiga indikator tersebut menunjukkan nilai sebesar 103,42% atau berpredikat **amat baik**.

Adapun penyebab capaian kinerja dari indikator tersebut mampu diatas target disebabkan antara lain :

1. Adanya kesepahaman antara Pusat, Provinsi, serta Kabupaten/Kota dalam mendorong sinergisitas program/kegiatan yang mendukung penguatan kelembagaan koperasi
2. Dukungan dari Pusat melalui APBN Dekonsentrasi melalui Kegiatan Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan yang tersebar di 17 Kabupaten/Kota sehingga mendorong peningkatan kualitas kelembagaan koperasi di Jawa Tengah.
3. Tumbuhnya kesadaran koperasi untuk meningkatkan profesionalisme dalam hal manajemen usaha guna menghadapi persaingan yang semakin dinamis.

Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja, upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Menjaga koordinasi dan komunikasi dengan Daerah guna memastikan program/kegiatan dapat dijalankan secara efektif dan efisien.
2. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program/kegiatan dengan melibatkan pihak terkait guna dijadikan penyempurnaan perencanaan kedepannya.

Oleh karena itu ke depan dalam rangka meningkatkan capaian kinerja tahun mendatang maka akan ditempuh strategi sebagai berikut :

1. Mendorong partisipasi peran Asosiasi Profesi maupun Perguruan Tinggi dalam memberikan pendampingan bagi koperasi maupun KSP guna meningkatkan kualitas kelembagaanya.
2. Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur terutama dari sisi pengetahuan atas peraturan terkait perkoperasian sehingga mampu melakukan pembinaan dan pengawasan kepada koperasi secara profesional.

b. Sasaran ke-2 :

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Sasaran ke-2, Indikator kinerja, target, dan realisasinya tercermin pada tabel sebagai berikut :

Tabel 8.
Pengukuran Pencapaian Sasaran ke-2

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Presentase (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Bertambahnya jumlah Produk OVOP berbasis Koperasi di Jateng	Jumlah Produk OVOP berbasis Koperasi di Jawa Tengah	175 Produk	175 Produk	100%
Rata-Rata capaian sasaran ke-2				100%

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja **sasaran ke-2**, dapat dilihat bahwa capaian sesuai dengan target (100%) atau berpredikat **baik**.

Upaya yang telah dilakukan guna mendukung pencapaian target tersebut antara lain :

1. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi program/kegiatan yang mendukung pengembangan OVOP dengan Kabupaten/Kota secara berkala guna memastikan adanya keserasian dalam pengembangan Produk Unggulan Daerah berbasis Sumber Daya Lokal.
2. Mendorong partisipasi Dunia Usaha dan Perguruan Tinggi dalam memberikan pendampingan serta pengembangan produk OVOP melalui program CSR ataupun penerapan Tri Dharma Bakti Perguruan Tinggi.

Oleh karena itu ke depan dalam rangka meningkatkan capaian kinerja tahun mendatang maka akan ditempuh strategi sebagai berikut :

1. Mengarahkan riset dari Perguruan Tinggi maupun Lembaga Riset Daerah ataupun Perusahaan untuk mendukung pengembangan OVOP di Jawa Tengah.
2. Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai program OVOP sehingga meningkatkan minat masyarakat untuk menggunakan produk – produk OVOP Jawa Tengah.

c. Sasaran ke-3 :

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Sasaran ke-3, Indikator kinerja, target, dan realisasinya tercermin pada tabel sebagai berikut :

Tabel 9.
Pengukuran Pencapaian Sasaran ke-3

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Presentase (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya daya saing KUMKM di Jawa Tengah	1. Presentase Pertumbuhan Aset Koperasi	1. 13,25%	1. 17,33%	1. 130,79%
	2. Presentase Pertumbuhan Aset UMKM yang dibina	2. 12,25%	2. 20,18%	2. 164,73%
	3. Presentase Pertumbuhan Omset Koperasi	3. 13,30%	3. 13,45%	3. 105,09%
	4. Presentase Pertumbuhan Omset UMKM yang dibina	4. 11,70%	4. 49,66%	4. 424,44%
	5. Presentase UMKM yang telah mengakses kredit	5. 25%	5. 29,46%	5. 117,84%
	6. Jangkauan Pemasaran Produk KUMKM	6. 13 Prov, 2 Luar Negeri	6. 15 Prov, 4 Luar Negeri	6. 126,67%
Rata-Rata capaian sasaran ke-3				178,26%

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja **sasaran ke-3**, dari 6 indikator kinerja sebagai tolak ukurnya tergambar bahwa secara umum capaian kinerja dari 6 indikator kinerja dicapai melebihi target yang telah ditetapkan (rata-rata capaian sasaran ke-3 adalah sebesar 178,26%) atau berpredikat **amat baik**.

Mengacu pada hasil pengukuran diatas terlihat bahwa terdapat 2 indikator yang pencapaiannya jauh diatas target, yaitu Presentase Pertumbuhan aset UMKM yang dibina (164,73%) dan Presentase Pertumbuhan Omset UMKM yang dibina (424,44%). Hal ini didorong oleh kebijakan Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah, yang mendorong perluasan akses pembiayaan bagi KUMKM. Di Jawa Tengah penyaluran kredit bagi UMKM melalui program Mitra Jateng 25 per Desember 2016 telah terealisasi sebesar 151,409 milyar rupiah bagi 8.056 KUMKM.

Dalam rangka mendorong peningkatan capaian kinerja di masa yang akan datang maka akan ditempuh strategi sebagai berikut :

1. Melakukan pemantauan secara berkala atas pelaksanaan program Mitra Jateng 25 dan 02 guna memastikan program tersebut tepat sasaran.
2. Meningkatkan peran serta Dunia Usaha maupun Perguruan Tinggi dalam memberikan pendampingan serta bimbingan teknis terkait manajemen usaha bagi KUKM.
3. Mendorong program kemitraan antara KUKM dengan Perusahaan Besar untuk memperluas potensi pasar bagi produk KUKM Jawa Tengah.

d. Sasaran ke-4 :

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Sasaran ke-4 :

Tabel 10.
Pengukuran Pencapaian Sasaran ke-4

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Presentase (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatkan jumlah wirausaha di Jawa Tengah	Penumbuhan wirausaha baru di Jawa Tengah	300 orang	560 orang	186,67%
Rata-Rata capaian sasaran ke-4				186,67%

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja **sasaran ke-4**, dari indikator kinerja diatas dapat dilihat bahwa kinerjanya melampaui target (186,67%) atau berpredikat **amat baik**. Adapun penyebab tingginya capaian kinerja dibanding target tersebut disebabkan antara lain :

1. Minat masyarakat untuk berwirausaha meningkat akibat kesadaran mereka untuk meningkatkan taraf hidupnya.
2. Kebijakan pemerintah yang mendukung penumbuhan wirausaha baru melalui penyediaan akses pembiayaan murah, pendidikan dan pelatihan, serta pendampingan dengan melibatkan pihak – pihak terkait.

Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja kedepan, upaya yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi program – program penumbuhan wirausaha baru antara Pusat dan Daerah guna memperluas sasaran penerima manfaat dari progam tersebut.

2. Mendorong pendampingan secara terpadu antar stakeholders untuk memastikan wirausaha baru tersebut dapat *survive* dan berkembang.

e. Sasaran ke-5 :

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Sasaran ke-5 :

**Tabel 11.
Pengukuran Pencapaian Sasaran ke-5**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Presentase (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya penyerapan tenaga kerja oleh KUMKM	Presentase Pertumbuhan Tenaga Kerja KUMKM	12,25%	8,88%	72,48%
Rata-Rata capaian sasaran ke-5				72,48%

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja **sasaran ke-5**, dari indikator kinerja diatas dapat dilihat bahwa kinerjanya dibawah target (72,48%) atau berpredikat **cukup**. Kondisi ini disebabkan antara lain :

1. Peningkatan pemanfaatan teknologi, baik dalam sisi produksi maupun operasional, oleh KUKM di Jawa Tengah mempengaruhi penyerapan tingkat tenaga kerja pada sektor koperasi dan UKM.
2. Menurunnya minat masyarakat untuk bekerja pada sektor koperasi akibat citra koperasi yang dianggap kurang bergengsi dibandingkan bekerja pada sektor teknologi ataupun perbankan.

Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja kedepan, upaya yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Mendorong peningkatan citra koperasi melalui gerakan masyarakat sadar koperasi, kampanye cinta koperasi, serta edukasi tentang koperasi kepada masyarakat.
2. Meningkatkan pengelolaan koperasi menjadi lebih profesional sehingga mampu bersaing dalam memberikan kompensasi dan benefit yang menarik bagi pencari kerja.

f. Sasaran ke-6 :

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Sasaran ke-6 :

Tabel 12.
Pengukuran Pencapaian Sasaran ke-6

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Presentase(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya Kualitas SDM Pengelola Koperasi dan UMKM	Pengelola KUMKM yang kompeten	15.625 orang	15.625 orang	100%
Rata-Rata capaian sasaran ke-6				100%

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja **sasaran ke-4**, dari indikator kinerja diatas dapat dilihat bahwa kinerjanya sesuai target (100%) atau berpredikat **amat baik**. Adapun penyebab tingginya capaian kinerja dibanding target tersebut disebabkan antara lain :

1. Meningkatnya kesadaran pengurus/pengelola KUMKM bahwa kunci keunggulan bersaing dalam situasi persaingan global yang semakin dinamis adalah pada sumber daya manusia.

Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja kedepan, upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kompetensi dan keahlian tenaga pengajar pada UPT Balai Latihan Koperasi dan UKM sesuai dengan kebutuhan KUMKM.
2. Mengintegrasikan sistem pelatihan antar stakeholders guna meningkatkan kompetensi peserta pelatihan.

B. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Berdasarkan pada hasil perhitungan pengukuran pencapaian sasaran (PPS) yang telah dilakukan di atas dengan membandingkan antara rencana pencapaian target dengan realisasi yang ada berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan, dapat diketahui bahwa Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya pada Tahun Anggaran 2016 dikategorikan **Amat Baik**. Sedangkan apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, walaupun terdapat beberapa indikator yang mengalami penurunan capaian tetapi secara mayoritas mengalami kenaikan capaian. Berikut disajikan perbandingan kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 dengan Tahun 2015.

Tabel 13.
Perbandingan Kinerja Tahun 2016 dan Tahun 2015

No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2016	Capaian Tahun 2015	Selisih (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Presentase Koperasi Aktif	100,41%	100,78%	(0,37%)
2	Presentase Koperasi Provinsi Berkualitas	100,25%	101,69%	(1,44%)
3	Presentase Koperasi Sehat	109,62%	103,14%	6,48%
4	Presentase Omset Koperasi terhadap PDRB Jawa Tengah	n/a*	4,70%	n/a
5	Jumlah Produk OVOP berbasis Koperasi di Jawa Tengah	100%	100%	0%
6	Presentase Pertumbuhan Aset Koperasi	130,79%	142,31%	11,52%
7	Presentase Pertumbuhan Aset UMKM yang dibina	164,73%	327,98%	(163.25%)
8	Presentase Pertumbuhan Omset Koperasi	105,09%	105,08%	0,01%
9	Presentase Pertumbuhan Omset UMKM yang dibina	424,44%	169,68%	254,76%
10	Presentase UMKM yang telah mengakses kredit	114,84%	Tidak Ada**	n/a
11	Jangkauan Pemasaran Produk KUMKM	126,67%	100%	26,67%
12	Penumbuhan wirausaha baru di Jawa Tengah	186,67%	120%	66,67%
13	Presentase Pertumbuhan Tenaga Kerja KUMKM	72,48%	100,17%	(27,69%)
14	Pengurus KUMKM yang terlatih	100%	100%	0%

* data tahun 2016 belum tersedia

** merupakan indikator baru pasca validasi IKU pada tahun 2015 sehingga tidak tercantum dalam Perjanjian Kinerja 2015

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah, pada tahun anggaran 2016, yaitu :

a. Target Pendapatan

Pada tahun 2016, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah ditargetkan untuk menghasilkan pendapatan sebanyak Rp. 615.000.000,- namun ternyata pendapatan yang diperoleh sebesar Rp 618.690.000,- atau dicapai sebesar 100,60%.

Rincian target dan realisasi pendapatan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 14.
Target dan Realisasi Pendapatan Tahun 2016**

No	Jenis Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih	Presentase (%)
1	2	3	4	5	6
1	Retribusi Pelayanan Pendidikan	40.000.000	0	(40.000.000)	0%
2	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	575.000.000	618.690.000	43.690.000	107,59%
Jumlah 2016		615.000.000	618.690.000	3.690.000	100,60%
Capaian Tahun 2015		579.700.000	586.797.626	7.097.626	101,22%
Selisih (2015 – 2014)		35.300.000	31.892.374	(3.407.626)	

Berdasarkan tabel di atas terlihat terdapat kenaikan target pendapatan Tahun 2016 dibandingkan Tahun 2015 , yaitu dari semula Rp. 579.700.00,- menjadi Rp. 615.000.000,-. Meskipun terdapat kenaikan target pendapatan, berkat kerja keras dan upaya peningkatan sarana prasarana UPT Balatkop, target tersebut dapat terpenuhi bahkan melampaui target. Realisasi pendapatan pada 2016 mencapai Rp. 618.690.000,- atau lebih besar Rp. 3.690.000,- (100,60%) dari target sebesar Rp. 615.000.000,-.

b. Pelaksanaan APBD Tahun 2016

Pada tahun 2016 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah mendapatkan anggaran sebesar Rp. 62.556.749.000,-, dengan serapan pada akhir tahun sebesar Rp. 60.894.376.893,- (97,34%) atau terdapat Sisa Lebih Pagu Anggaran sebesar Rp. 1.662.372.107,-.

Anggaran sejumlah Rp. 62.556.749.000,- tersebut terdiri atas : (1) Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 20.507.124.000,- ; dan (2) Belanja Langsung sebesar Rp. 42.049.625.000,-

Apabila dilihat dari jenis belanja, maka realisasi belanja tidak langsung adalah sebesar Rp. 19.931.167.740,- (97,19%) dari total anggaran yang tersedia sebesar Rp 20.507.124.000,- . Sementara untuk belanja langsung dari anggaran sebesar Rp. 42.049.625.000,- direalisasikan sebesar Rp. 40.963.209.153,- (97,42%).

Selanjutnya disajikan perincian data anggaran dan realisasi belanja tidak langsung dan belanja langsung pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah tahun 2016.

Tabel 15.
Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Tahun 2016

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN APBD	REALISASI	SELISIH	%
1	2	3	4	5	6
I	BELANJA TIDAK LANGSUNG	20.507.124.000	19.931.167.740	575.956.260	97,19
II	BELANJA LANGSUNG	42.049.625.000	40.963.209.153	1.086.415.847	97,42
	I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Sekretariat Dinas	10.000.000	9.990.350	9.650	99,90
	2 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Balatkop	6.000.000	5.999.930	70	99,99
	3 Penyediaan Jasa komunikasi, SDA dan Listrik Sekretariat Dinas	721.715.000	703.768.014	17.946.986	97,51
	4 Penyediaan Jasa komunikasi, SDA dan Listrik Balatkop	274.500.000	264.419.930	10.080.070	96,33
	5 Jaminan Barang Milik Daerah	80.000.000	77.872.000	2.128.000	97,34
	6 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas Sekretariat Dinas	639.100.000	638.561.000	539.000	99,92
	7 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas Balatkop	252.300.000	250.498.000	1.802.000	99,29
	8 Penyediaan alat tulis kantor Sekretariat	300.000.000	298.171.000	1.829.000	99,39
	9 Penyediaan alat tulis kantor Balatkop	30.000.000	29.998.000	2.000	99,99
	10 Penyediaan Makanan dan Minuman	82.500.000	82.480.000	20.000	99,98
	11 Penyediaan barang cetak dan penggandaan Sekretariat	50.000.000	49.890.000	110.000	99,78
	12 Penyediaan barang cetak dan penggandaan Balatkop	30.000.000	30.000.000	0	100
	13 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor Sekretariat	70.000.000	69.897.100	102.900	99,85
	14 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor Balatkop	35.000.000	34.828.000	172.000	99,51

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN APBD	REALISASI	SELISIH	%
1	2	3	4	5	6
15	Penyediaan peralatan rumah tangga Sekretariat	30.000.000	29.197.000	803.000	97,32
16	Penyediaan peralatan rumah tangga Balatkop	27.200.000	27.200.000	0	100
17	Penyediaan bahan bacaan, peraturan perundang – undangan Sekretariat	22.125.000	22.082.500	42.500	99,81
18	Penyediaan bahan bacaan, peraturan perundang – undangan Balatkop	10.000.000	10.000.000	0	100
19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan luar daerah Sekretariat	950.000.000	949.876.594	123.406	99,99
20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan luar daerah Balatkop	60.000.000	59.854.122	145.878	99,76
21	Penyediaan jasa pelayanan perkantoran Sekretariat Dinas	808.920.000	789.312.000	19.608.000	97,58
22	Penyediaan jasa pelayanan perkantoran Balatkop	154.650.000	152.160.000	2.490.000	98,39
23	Penyediaan Biaya Publikasi dan Dokumentasi	140.000.000	139.250.000	750.000	99,46
II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					
24	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor Sekretariat Dinas	537.380.000	533.253.400	4.126.600	99,23
25	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor Balatkop	140.000.000	139.902.000	98.000	99,93
26	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	590.500.000	589.755.099	744.901	99,87
27	Pemeliharaan rutin/ berkala meubelair Sekretariat	21.000.000	21.000.000	0	100
28	Pemeliharaan rutin/ berkala meubelair Balatkop	40.000.000	40.000.000	0	100
29	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor dan Rumah tangga Sekretariat	183.000.000	182.310.000	690.000	99,62
30	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor dan Rumah tangga Balatkop	111.880.000	111.880.000	0	100
31	Peningkatan sarana dan prasarana kantor Sekretariat	1.080.700.000	1.009.986.760	70.713.240	93,46
32	Peningkatan sarana dan prasarana kantor Balatkop	114.620.000	114.620.000	0	100
III Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.					
33	Pendidikan dan Pelatihan Formal.	65.000.000	58.278.328	6.721.672	89,66
IV Program Pendidikan Non Formal dan Informal					
34	Pendidikan dan pelatihan masyarakat KUMKM	2.400.000.000	2.381.101.000	18.899.000	99,21
V Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak					
35	Peningkatan Kualitas dan Kinerja Kelembagaan Usaha bagi Kelompok Wanita Usaha/Kopwan	250.000.000	237.900.000	12.100.000	95,16
VI Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan Koperasi dan UMKM.					
36	Peningkatan Pemasyarakatan dan Kelembagaan Koperasi	850.000.000	833.863.000	16.137.000	98,10
37	Pembinaan dan Pengawasan Koperasi	900.000.000	899.586.000	414.000	99,95

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN APBD	REALISASI	SELISIH	%
1	2	3	4	5	6
38	Pemeringkatan Koperasi dan Penilaian Kesehatan KSP	767.000.000	751.024.402	15.975.598	97,92
39	Pengembangan Manajemen dan Usaha KSP	483.000.000	468.019.400	14.980.600	96,90
40	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pemberdayaan KUMKM	610.000.000	590.856.850	19.143.150	96,86
	VII Program Peningkatan Produktivitas Pemasaran dan Jaringan Usaha				
41	Peningkatan Jaringan Produk KUKM bagi Anggota Mitra Praja Utama (MPU)	300.000.000	291.795.000	8.205.000	97,27
42	Fasilitasi Akses Pemasaran bagi Produk KUMKM	1.046.000.000	1.036.437.150	9.562.850	99,09
43	Pengembangan Layanan Usaha bagi KUMKM	300.000.000	299.794.000	206.000	99,93
44	Komite Pemasaran Produk Unggulan Produk KUMKM	50.000.000	48.086.634	1.913.366	96,17
	VIII Program Peningkatan Kualitas SDM KUMKM				
45	Kegiatan Peningkatan dan Penguatan Kualitas SDM KUMKM	5.400.535.000	5.342.542.000	57.993.000	98,93
46	Kegiatan Pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dan/atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau.	10.250.000.000	9.848.313.996	401.686.004	96,08
	IX Program Pengembangan Produk Unggulan Daerah berbasis Sumber Daya Lokal				
47	Fasilitasi Perlindungan Produk UMKM	500.000.000	481.002.400	18.997.600	96,20
48	Penguatan ekonomi masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dalam rangka pengentasan kemiskinan, mengurangi pengangguran dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.	6.250.000.000	6.001.795.938	248.204.062	96,03
49	Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing UMKM	900.000.000	884.739.322	15.260.678	98,30
50	Pemberdayaan Koperasi Produksi dan Koperasi Konsumen	1.225.000.000	1.177.928.510	47.071.490	96,16
51	Peningkatan Kualitas Usaha Koperasi Sektor Pertanian	950.000.000	925.150.524	24.849.476	97,38
	X Program Pengembangan Akses Permodalan dan Efektivitas Pembiayaan				
52	Fasilitasi Akses Permodalan bagi KUMKM	675.000.000	661.983.100	13.016.900	98,07
53	Pengendalian Pembiayaan KUMKM	275.000.000	274.998.800	1.200	99,99
	JUMLAH BELANJA (I + II)	62.556.749.000	60.894.376.893	1.662.372.107	97,34

BAB IV P E N U T U P

A. TINJAUAN UMUM KEBERHASILAN

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah sebagai SKPD teknis yang mempunyai tugas pokok menyusun kebijakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan urusan pemerintah di bidang Koperasi dan UMKM mempunyai fungsi untuk memberikan pelayanan di bidang koperasi dan UMKM pada masyarakat. Untuk mengetahui sejauh mana efektivitas atas program/kegiatan yang telah dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah. Jateng terkait pemberdayaan Koperasi dan UMKM perlu dilakukan evaluasi.

Dengan memperhatikan uraian dan paparan data tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa hasil evaluasi terhadap kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah dapat dikatakan berhasil, karena semua target sasaran yang telah ditetapkan dicapai dengan kategori **Amat Baik**. Hal tersebut didukung dengan data sebagai berikut :

- a. Hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) dicapai (141,23%),
- b. Dinas Koperasi dan UMKM Prov. Jawa Tengah menggunakan dana kurang dari dana yang dianggarkan. Hal ini berarti terjadi efisiensi sebesar Rp. 1.662.372.107,- (2,66%) dari anggaran yang disediakan

Tingginya PPS sangat dipengaruhi oleh indikator sasaran ke-3 yaitu pada indikator presentase peningkatan omzet UMKM yang dibina, dimana target indikator tersebut hanya sebesar 11,60% tetapi realisasinya mampu mencapai 49,66% (424,44% dari target). Kondisi ini didorong oleh program Pemerintah Pusat maupun Daerah dalam memperluas akses pembiayaan bagi KUMKM. Di Jawa Tengah, realisasi program Mitra Jateng 25 per Desember 2016 telah terealisasi sebesar 151,409 milyar rupiah bagi 8.056 KUKM. Sedangkan realisasi penyaluran kredit bagi UMKM di Jawa Tengah menurut Bank Indonesia hingga bulan Oktober 2016 mencapai Rp. 87,75 trilyun atau naik sebesar Rp. 8,93 trilyun (11,32%) dibanding tahun 2018 yang hanya sebesar Rp. 78,82 trilyun.

Apabila dilihat dari sisi pendapatan, pada tahun 2016 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah mampu memberikan kontribusi

pendapatan sebesar Rp. 618.690.000,- atau lebih besar Rp. 3.690.000,- (100,60 %) dari target pendapatan sebesar Rp. 615.000.000,-. Terlampauinya target tersebut disebabkan oleh optimalisasi pemanfaatan UMKM Center di Jl. Setiabudi no 192 Semarang dan UPT Balatkop.

B. PERMASALAHAN ATAU KENDALA YANG BERKAITAN DENGAN PENCAPAIAN KINERJA

Permasalahan atau kendala yang ditemui dalam pelaksanaan program/kegiatan adalah :

1. Pengetahuan masyarakat tentang koperasi relatif terbatas sehingga mempengaruhi persepsi koperasi di mata masyarakat. Koperasi sering dipandang sebagai lembaga pranata sosial saja dan bukan sebagai organisasi ekonomi yang mampu memberikan manfaat bagi anggotanya.
2. Keterbatasan kapasitas sumber daya pengurus/pengelola koperasi dan UMKM di Jawa Tengah.
3. Jumlah aparatur pembina koperasi dan UMKM di daerah relatif terbatas, selain itu kapasitas dan dukungan sarana prasarana bagi aparatur dalam melakukan pembinaan dan pengawasan juga kurang memadai.

C. STRATEGI PEMECAHAN MASALAH

Strategi yang dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah :

1. Mendorong peningkatan pemahaman masyarakat tentang keunggulan koperasi sebagai sarana perekonomian
 - a. Melakukan edukasi dan kampanye cinta koperasi kepada masyarakat melalui gerakan masyarakat sadar koperasi, sosialisasi dan talkshow kepada masyarakat, dialog dan layanan konsultasi koperasi.
 - b. Mendorong peningkatan status kelompok masyarakat ataupun kelompok pra-koperasi menjadi koperasi melalui program penguatan kapasitas kelembagaan koperasi.
 - c. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Koperasi secara berkala.

- d. Mendorong koperasi untuk melakukan tertib administrasi dan kelembagaan Koperasi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
2. Mendorong peningkatan kapasitas sumber daya manusia bagi Pengurus/Pengelola koperasi dan UMKM
 - a. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas Pengurus/Pengelola koperais dan UMKM melalui aneka pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi, manajerial, ataupun teknis.
 - b. Pengembangan kompetensi dan pengetahuan Instruktur ataupun Tenaga Pengajar pada lembaga – lembaga pelatihan koperasi melalui kerjasama dengan Perguruan Tinggi.
 - c. Mendorong program kemitraan antara KUMKM, Perguruan Tinggi, Dunia Usaha maupun pihak – pihak terkait lainnya dalam memberikan pendampingan serta kesempatan magang bagi pengurus/pengelola KUMKM.
 3. Mendorong komitmen Kabupaten/Kota dalam melakukan pembinaan bagi koperasi dan UMKM melalui penyediaan dukungan sarana prasarana serta pelatihan bagi aparatur Pembina secara teratur.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 untuk SKPD Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/ evaluasi untuk kegiatan/kinerja yang akan datang

Semarang, Januari 2017

**KEPALA DINAS KOPERASI
USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI JAWA TENGAH**

Dra. EMA RACHMAWATI, M.Hum

Pembina Utama Muda
NIP. 19660517 199008 2 001

Lampiran 1

PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN (PPS)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Presentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya peran Koperasi dalam perekonomian Jawa Tengah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Presentase Koperasi Aktif 2. Presentase Koperasi Provinsi Berkualitas 3. Presentase Koperasi Sehat 4. Presentase omzet Koperasi terhadap PDRB Jawa Tengah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 81,45% 2. 52% 3. 17,15% 4. 6,75% 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 81,78% 2. 52,13% 3. 18,80% 4. Data belum tersedia 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 100,41% 2. 100,25% 3. 109,62% 4. Data belum tersedia
Bertambahnya jumlah Produk OVOP berbasis Koperasi di Jateng	Jumlah Produk OVOP berbasis Koperasi di Jawa Tengah	175 Produk	175 Produk	100%
Meningkatnya daya saing KUMKM di Jawa Tengah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Presentase Pertumbuhan Aset Koperasi 2. Presentase Pertumbuhan Aset UMKM yang dibina 3. Presentase Pertumbuhan Omset Koperasi 4. Presentase Pertumbuhan Omset UMKM yang dibina 5. Presentase UMKM yang telah mengakses kredit 6. Jangkauan Pemasaran Produk KUMKM 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 13,25% 2. 12,25% 3. 13,30% 4. 11,70% 5. 25% 6. 13 Prov, 2 Luar Negeri 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 17,33% 2. 20,18% 3. 13,45% 4. 49,66% 5. 29,46% 6. 15 Prov, 4 Luar Negeri 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 130,79% 2. 164,73% 3. 105,09% 4. 424,44% 5. 117,84% 6. 126,67%
Meningkatkan jumlah wirausaha di Jawa Tengah	Penumbuhan wirausaha baru di Jawa Tengah	300 orang	560 orang	186,67%

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Presentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya penyerapan tenaga kerja oleh KUMKM	Presentase Pertumbuhan Tenaga Kerja KUMKM	12,25%	8,88%	72,48%
Meningkatnya Kualitas SDM Pengelola Koperasi dan UMKM	Pengelola KUMKM yang kompeten	15.625 orang	15.625 orang	100%

Lampiran 2

**ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2016**

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN APBD	REALISASI	SELISIH	%
1	2	3	4	5	6
I	BELANJA TIDAK LANGSUNG	20.507.124.000	19.931.167.740	575.956.260	97,19
II	BELANJA LANGSUNG	42.049.625.000	40.963.209.153	1.086.415.847	97,42
	I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Sekretariat Dinas	10.000.000	9.990.350	9.650	99,90
	2 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Balatkop	6.000.000	5.999.930	70	99,99
	3 Penyediaan Jasa komunikasi, SDA dan Listrik Sekretariat Dinas	721.715.000	703.768.014	17.946.986	97,51
	4 Penyediaan Jasa komunikasi, SDA dan Listrik Balatkop	274.500.000	264.419.930	10.080.070	96,33
	5 Jaminan Barang Milik Daerah	80.000.000	77.872.000	2.128.000	97,34
	6 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas Sekretariat Dinas	639.100.000	638.561.000	539.000	99,92
	7 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas Balatkop	252.300.000	250.498.000	1.802.000	99,29
	8 Penyediaan alat tulis kantor Sekretariat	300.000.000	298.171.000	1.829.000	99,39
	9 Penyediaan alat tulis kantor Balatkop	30.000.000	29.998.000	2.000	99,99
	10 Penyediaan Makanan dan Minuman	82.500.000	82.480.000	20.000	99,98
	11 Penyediaan barang cetak dan penggandaan Sekretariat	50.000.000	49.890.000	110.000	99,78
	12 Penyediaan barang cetak dan penggandaan Balatkop	30.000.000	30.000.000	0	100
	13 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor Sekretariat	70.000.000	69.897.100	102.900	99,85
	14 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor Balatkop	35.000.000	34.828.000	172.000	99,51
	15 Penyediaan peralatan rumah tangga Sekretariat	30.000.000	29.197.000	803.000	97,32

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN APBD	REALISASI	SELISIH	%
1	2	3	4	5	6
16	Penyediaan peralatan rumah tangga Balatkop	27.200.000	27.200.000	0	100
17	Penyediaan bahan bacaan, peraturan perundang – undangan Sekretariat	22.125.000	22.082.500	42.500	99,81
18	Penyediaan bahan bacaan, peraturan perundang – undangan Balatkop	10.000.000	10.000.000	0	100
19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan luar daerah Sekretariat	950.000.000	949.876.594	123.406	99,99
20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan luar daerah Balatkop	60.000.000	59.854.122	145.878	99,76
21	Penyediaan jasa pelayanan perkantoran Sekretariat Dinas	808.920.000	789.312.000	19.608.000	97,58
22	Penyediaan jasa pelayanan perkantoran Balatkop	154.650.000	152.160.000	2.490.000	98,39
23	Penyediaan Biaya Publikasi dan Dokumentasi	140.000.000	139.250.000	750.000	99,46
II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					
24	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor Sekretariat Dinas	537.380.000	533.253.400	4.126.600	99,23
25	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor Balatkop	140.000.000	139.902.000	98.000	99,93
26	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	590.500.000	589.755.099	744.901	99,87
27	Pemeliharaan rutin/ berkala meubelair Sekretariat	21.000.000	21.000.000	0	100
28	Pemeliharaan rutin/ berkala meubelair Balatkop	40.000.000	40.000.000	0	100
29	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor dan Rumah tangga Sekretariat	183.000.000	182.310.000	690.000	99,62
30	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor dan Rumah tangga Balatkop	111.880.000	111.880.000	0	100
31	Peningkatan sarana dan prasarana kantor Sekretariat	1.080.700.000	1.009.986.760	70.713.240	93,46
32	Peningkatan sarana dan prasarana kantor Balatkop	114.620.000	114.620.000	0	100
III Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.					
33	Pendidikan dan Pelatihan Formal.	65.000.000	58.278.328	6.721.672	89,66
IV Program Pendidikan Non Formal dan Informal					
34	Pendidikan dan pelatihan masyarakat KUMKM	2.400.000.000	2.381.101.000	18.899.000	99,21

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN APBD	REALISASI	SELISIH	%
1	2	3	4	5	6
	V Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak				
35	Peningkatan Kualitas dan Kinerja Kelembagaan Usaha bagi Kelompok Wanita Usaha/Kopwan	250.000.000	237.900.000	12.100.000	95,16
	VI Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan Koperasi dan UMKM.				
36	Peningkatan Pemasyarakatan dan Kelembagaan Koperasi	850.000.000	833.863.000	16.137.000	98,10
37	Pembinaan dan Pengawasan Koperasi	900.000.000	899.586.000	414.000	99,95
38	Pemeringkatan Koperasi dan Penilaian Kesehatan KSP	767.000.000	751.024.402	15.975.598	97,92
39	Pengembangan Manajemen dan Usaha KSP	483.000.000	468.019.400	14.980.600	96,90
40	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pemberdayaan KUMKM	610.000.000	590.856.850	19.143.150	96,86
	VII Program Peningkatan Produktivitas Pemasaran dan Jaringan Usaha				
41	Peningkatan Jaringan Produk KUMKM bagi Anggota Mitra Praja Utama (MPU)	300.000.000	291.795.000	8.205.000	97,27
42	Fasilitasi Akses Pemasaran bagi Produk KUMKM	1.046.000.000	1.036.437.150	9.562.850	99,09
43	Pengembangan Layanan Usaha bagi KUMKM	300.000.000	299.794.000	206.000	99,93
44	Komite Pemasaran Produk Unggulan Produk KUMKM	50.000.000	48.086.634	1.913.366	96,17
	VIII Program Peningkatan Kualitas SDM KUMKM				
45	Kegiatan Peningkatan dan Penguatan Kualitas SDM KUMKM	5.400.535.000	5.342.542.000	57.993.000	98,93
46	Kegiatan Pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja masyarakat dilingkungan industri hasil tembakau dan/atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau.	10.250.000.000	9.848.313.996	401.686.004	96,08
	IX Program Pengembangan Produk Unggulan Daerah berbasis Sumber Daya Lokal				
47	Fasilitasi Perlindungan Produk UMKM	500.000.000	481.002.400	18.997.600	96,20
48	Penguatan ekonomi masyarakat dilingkungan industri hasil tembakau dalam rangka pengentasan kemiskinan, mengurangi pengangguran dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.	6.250.000.000	6.001.795.938	248.204.062	96,03
49	Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing UMKM	900.000.000	884.739.322	15.260.678	98,30
50	Pemberdayaan Koperasi Produksi dan Koperasi Konsumen	1.225.000.000	1.177.928.510	47.071.490	96,16
51	Peningkatan Kualitas Usaha Koperasi Sektor Pertanian	950.000.000	925.150.524	24.849.476	97,38

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN APBD	REALISASI	SELISIH	%
1	2	3	4	5	6
	X Program Pengembangan Akses Permodalan dan Efektivitas Pembiayaan				
52	Fasilitasi Akses Permodalan bagi KUMKM	675.000.000	661.983.100	13.016.900	98,07
53	Pengendalian Pembiayaan KUMKM	275.000.000	274.998.800	1.200	99,99
	JUMLAH BELANJA (I + II)	62.556.749.000	60.894.376.893	1.662.372.107	97,34